

BERSYARIF MATA MELAKUKAN
SEBAGI SIBERAN MALPAH

Kebebasan dan Rekayasa Makna dalam Media massa

Neka Fitriyah

IAKTI - DHARMA - WASPADA



Kebebasan dan Rekayasa Makna dalam Media massa

Neka Fitriah



ABSTRACT

An analysis of certain motives in a media or text. It is said as the production of power. Power does not only hold on one central point, especially on dominant parties, but also power is spreada in all over society. (no one has the power. Power does not belong to a king, boss, president or official, but it is in a form of strategy). Power does not work through repression, but through a positive or productive normalization, that is through a discourse that creates a meaning. Meaning is derived from information which is organized by the press. Power production that happens then is an emergence of strategy to aspirate meanings continuously so that people unconsciously consider spreading meanings as an absolute truth. However meaning is a result of a construction which is produced by dominant party with certain interests. This blowing discourse creates a categorisation gradually, like a good or bad behavior, which controls people behavior, and in the end it is considered as a constitutional truth. For this matter, what is touched by power are individual soul, mind, awareness, and will. Meaning is not something that needs to be packed carefully anymore before spreading it to consumer, but press has normalized meaning continuously in order that its behavior is appropriate to what the press wants. In the end, public will see that reality which is created from series of meanings is a natural thing without questioning or doubt. At this point, press arranges meanings liberally on each presented information.

Key words: power and meaning control.



Pendahuluan

Berbicara tentang Pers dan dinamika yang terjadi dalam aktivitas jurnalistik bukan hanya menarik dan banyak manfaatnya, tetapi juga banyak sekali permasalahan penting berdampak serius yang luput dari kajian ilmiah. Terlebih bila menyorot tentang bentuk-bentuk pemberitaan di media dalam memproduksi makna disetiap informasi yang disajikannya. Selain memang pemberitaan mengandung banyak informasi atau pesan tetapi hal yang lebih penting adalah terkandungnya makna didalam sebuah berita yang kemudian akan dicerna, dipahami dan dimaknai kembali oleh pembacanya. Sehingga memungkinkan terjadinya pemberitaan yang dipenuhi intrik-intrik perikayasaan makna (entah karena efisiensi, efektifitas dan bisnis) yang pada akhirnya akan membentuk sebuah realitas sosial dan disepakati bersama.

Seperti misalnya ketika ada peristiwa mogok kerja karyawan pabrik rokok Gudang Garam di Kediri. Realitas yang muncul ketika pemogokan itu berlangsung adalah aktivitas masyarakat yang sepi, terjadi kericuhan di beberapa tempat dan turunnya pendapatan pemerintah dari cukai. Padahal apabila peristiwa itu diberitakan berdasarkan fakta, kenapa peristiwa tersebut tidak ditulis sebagai buah dari rendahnya upah kerja, tidak adanya tunjangan serta arogansi pihak direksi maka maknanyapun akan berpersektif lain. Adapun realitas yang hadir berupa keributan, dan lesunya perekonomian adalah sebuah dampak yang relatif jauh lebih sederhana dibandingkan dengan permasalahan sesungguhnya.

Pekerjaan pers pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas isi media adalah hasil proses pemberitaan media dalam mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya. Misalnya kasus mogok kerja buruh pabrik rokok Gudang Garam diatas. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan pers adalah memberitakan peristiwa-peristiwa dengan kaidah pemberitaan, maka seluruh isi berita adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*Constructed Reality*). Berita pada dasarnya jauh dari sekedar penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita yang mengandung makna (Tauchman, 1980).

Mengawali diskusi mengenai makna sebagai hasil produksi pers, maka dengan hati-hati harus dimulai dari bagaimana kita memahami dan mengerti betul tentang apa yang dimaksud dengan Pers dan Makna terlebih dahulu. Hal ini menjadi penting, agar kemudian tidak terjadi tumpang tindih pengertian dan pemahaman. Setidaknya dalam tulisan ini ada arus wacana yang akan diikuti yaitu; bagaimana ideologi dan kekuasaan berperan dalam politik pemaknaan; peran dari lembaga pers dengan segala fungsi yang diembannya dan publik sebagai penikmat makna.

Secara harfiah pers berasal dari bahasa Belanda "*Pers*" yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata "*Press*" dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan

perantara barang cetakan. Tetapi, sekarang kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak atau elektronik. Secara singkat pengertian pers terbagi dua: pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet (Muhammad Budyatna:2006:17).

Mengenai Makna, sebagaimana dikemukakan oleh Fisher (1986:343), merupakan konsep abstrak yang ada dalam diri manusia. Makna tidak terletak pada kata-kata tetapi dalam diri manusia, kata-kata hanya bentuk ungkapan untuk mendekati makna yang akan dikomunikasikan, tetapi kata-kata ini tidak secara lengkap dan sempurna menggambarkan makna yang kita maksudkan. Semua ahli komunikasi, seperti dikutip Jalaludin Rakhmat(1996), sepakat bahwa makna sangat subjektif. *Words don't mean, people mean*. Sekiranya ada buku yang menyampaikan makna secara objektif, orang akan menunjuk kamus, dan seorang penyusun kamus akan hanya akan menghimpun kata yang ia temukan dalam pemakaian; percakapan dan tulisan. Dengan sangat mengejutkan bahwa kamuspun ternyata menyajikan makna secara subjektif. Dalam konteks wacana, makna kata dapat dibatasi sebagai "Hubungan antara bentuk dengan hal atau barang yang diwakilinya (*referen-nya*)" (Keraf, 1994:25). Ada tiga hal yang dijelaskan para filsuf dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna.

Ketiga hal itu, yakni: (1) menjelaskan makna secara lamiah, (2) mendeskripsikan kalimat secara alamiah dan (3) menjelaskan makna dalam proses komunikasi (Kempson, dalam Pateda, 2001:7).

Ada beberapa pendapat mengenai jenis atau tipe makna. Brodbeck (1993), misalnya, seperti dikutip Fisher (1986:344-345), mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga pengertian tentang konsep makna yang berbeda-beda. Salah satu jenis makna menurut tipologi Bordbeck, adalah makna *referensial*: yakni, makna suatu istilah adalah objek pikiran, ide atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah tersebut. Pengertian makna ini serupa dengan apek "semantis"-hubungan lambang dengan referen (yang ditunjuk). Tipe makna yang *kedua* dari brodbeck adalah arti istilah itu. Dengan kata lain, lambang atau istilah itu "berarti" sejauh ia berhubungan secara "sah" dengan istilah yang lain. ketiga, mencakup makna yang dimaksudkan (intentional) dalam arti bahwa arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa yang dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu.

Pertanyaan berikutnya adalah: Bagaimana suatu teks dimaknai? Mengapa seseorang memaknai dan menafsirkan teks wacana dengan pandangan tertentu atau bagaimana teks dibentuk dengan cara-cara tertentu?

Apa yang menyebabkan terjadinya pemaknaan semacam itu? Menurut Jhon Fiske (1990:164) makna tidak intrinstik ada dalam teks itu sendiri. Seseorang membaca sesuatu teks berita tidak menemukan makna dalam teks, sebab yang dia temukan dan hadapi secara langsung adalah pesan dalam teks. Makna itu diproduksi lewat proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pembuat maupun khalayak pembaca. Pembaca dan teks secara bersama-sama mempunyai andil yang sama dalam memproduksi pemaknaan, dan hubungan itu menempatkan seseorang sebagai satu bagian dari hubungannya dengan sistem tata nilai yang lebih besar dimana dia hidup dalam masyarakat. Pada titik inilah ideologi bekerja.

Ideologi dalam Aktivitas Pers

Aart van Zoest, menuliskan makna tak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi (van Zoest, 1991:70). Eriyanto menempatkan ideologi sebagai konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini menurutnya, karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktek ideologi atau pencerminan dari ideologi (Eriyanto, 2001:13). Secara sederhana, ideologi bagi masyarakat modern ini digunakan sebagai alat pemecah masalah. Ideologi, menurut sargent (Sunarto, 2001:34) memberikan suatu gambaran mengenai dunia, baik kini maupun dimasa depan, serta bagaimana menyusun kompleksitas dunia menjadi sederhana dan dapat dipahami. Ada banyak pengertian ideologi. Dengan kata lain, ideologi dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Dalam pengertian yang paling umum dan lunak, ideologi adalah pikiran yang terorganisir yakni nilai orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi.

Pertanyaan utama disini terutama peranan wacana dalam kerangka ideologi. Seperti dikatakan oleh teun A. Van Dijk, ideologi terutama dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota kelompok. Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok. Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai beberapa implikasi penting. *Pertama* ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual: membutuhkan share antara anggota kelompok, organisasi atau kolektivitas dengan orang lainnya. *Kedua*, ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal diantara anggota kelompok atau komunitas.

Oleh karena itu ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi tetapi juga membentuk identitas dari kelompok, membedakan dengan kelompok lain. Dengan pandangan semacam ini, makna lalu tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan berlangsung secara alamiah, karena dalam setiap makna tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup,

tetapi harus melihat konteks terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana. Dalam teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah teks yang muncul tersebut pencerminan dari ideologi seseorang apakah, feminis, antifeminis, kapitalis, sosialis dan sebagainya.

Melengkapi pandangan tersebut, walau bagaimanapun harus diletakkan pemahaman kepada publik bahwa suatu informasi yang merupakan obyek komunikasi tersebut jelas tidak akan lepas dari aliran pandangan si pembuatnya, sehingga pandangan suatu aliran tentunya akan terlihat jelas dari karakteristik informasi yang disajikannya tersebut. Jika si intelektual tersebut beraliran kapitalis maka tentunya ia tidak akan menulis tentang kebaikan aliran sosialis yang berlawanan dengannya, demikian juga sebaliknya. Demikian juga jika si intelektual tersebut ternyata non religius maka ia akan menuliskan bahwa ketentuan keagamaan adalah suatu kemunafikan dan demikian pula sebaliknya. Walhasil, jelas dirasakan adanya suatu perang informasi terhadap suatu kepentingan.

Politik Kekuasaan dan Kekuatan dalam Makna

Dalam kaitannya dengan makna yang diproduksi kalangan pers, terdapat titik penting dalam memahami pers. Adalah bagaimana pers melakukan politik pemaknaan. Bagaimana proses menerjemahkan fakta dengan pilihan kata yang sarat dengan makna, dan bagaimana kekuatan kepentingan mengintervensi makna yang mesti dipublikasikan. Yang menjadi persoalan dalam lalu lintas pertukaran dan produksi makna ini adalah siapa yang memegang kendali dalam memberikan pemahaman dalam realitas sosial, siapa yang memegang kendali sebagai agen memproduksi makna, dan siapa atau kelompok mana yang berperan sebagai konsumen dari pemaknaan tersebut.

Michael Foucault, adalah salah satu filsuf postmodernis yang menawarkan analisis tentang motif-motif tertentu pada suatu media atau teks. Foucault mengatakannya sebagai "produksi kekuasaan". Bahwa kekuasaan tidak bertumpu pada satu titik sentral termasuk tidak hanya pada pihak-pihak yang dominan, melainkan tersebar di seluruh masyarakat (tidak ada seorang pun yang memilikinya) (John Lechte, 2001). Kuasa bukanlah milik raja, boss, presiden, atau pejabat, tetapi dalam bentuk strategi.

Kekuasaan tidak bekerja melalui penindasan atau represi, melainkan melalui normalisasi yang positif dan produktif, yaitu melalui wacana. Iklan, adalah salah satu tayangan media yang menyebarkan kuasa (strategi) tentang normalisasi tubuh perempuan. Produksi kekuasaan yang terjadi kemudian adalah munculnya strategi untuk menghembuskan wacana "langsing", "kulit putih", "rambut lurus hitam panjang", yang mencuat terus menerus sehingga secara tidak sadar masyarakat menganggap tubuh perempuan yang ideal dan normal adalah; langsing, berkulit putih, dan berambut lurus. Disini

tengah berlangsung bergulirnya strategi kuasa yang diproduksi terus menerus.

Wacana yang dihembuskan ini secara perlahan-lahan menciptakan kategorisasi, seperti perilaku baik atau buruk yang sebenarnya mengendalikan perilaku masyarakat yang pada akhirnya dianggap kebenaran yang telah ditetapkan. Atas hal ini, bukan tubuh fisik lagi yang disentuh kuasa, melainkan jiwa, pikiran, kesadaran dan kehendak individu.

Makna bukan lagi menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan dengan hati-hati terhadap konsumen, melainkan pers mencoba menormalkan makna agar perilakunya sesuai dengan yang diinginkan pihak pers. Foucault menegaskan persoalan ini sebagai kekuasaan atas kehidupan modern atau kapitalisme, salah satunya yaitu untuk mencapai target penjualan produk (Eriyanto, 2001).

Dalam banyak kasus, pemberitaan pers terutama yang berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan pihak dominan-selalu disertai penggambaran buruk pihak yang kurang dominan. Karena itu tidak mengherankan bila gambaran perempuan, kaum buruh, dan petani yang menjadi korban justru digambarkan serba buruk. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa media bukanlah suatu entitas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh kelompok dominan atau yang mempunyai kepentingan.

Misalnya pemberitaan media atas kekerasan terhadap perempuan, bukankah selama ini pemberitaan kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah konstruksi dari ideologis dari budaya patriarkis yang berkembang dan berlaku secara normatif dalam masyarakat dan pers pun sebagai pihak yang dipercaya mengemban nilai kebenaran turut melanggengkannya dalam bentuk berita-berita yang bias gender yang pada akhirnya bermuara pada pemaknaan yang merugikan pihak perempuan.

Banyak praktek-praktek lain dimana pers memberikan ruang longgar bagi kelompok dominan dan kelompok kepentingan. Sebuah contoh yang marak dilihat adalah, bagaimana politik pemaknaan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung. Dari beberapa proses yang harus dilalui masing-masing kandidat mulai dari pencalonan, masa kampanye, pemilihan dan pelantikan. Sering tampak bagaimana pers menampilkan bukan saja persona makna untuk menciptakan persepsi yang positif dalam menggiring suara tetapi juga praktik-praktik dimana persoalan bisnis bermain. Sudah bisa dilihat bagaimana kandidat yang memiliki dukungan finansial besar akan lebih mendominasi penyebaran makna melalui media, entah karena pertimbangan membeli kolom, durasi atau air time untuk media elektronik atau bahkan kepemilikan saham. Sudah barang tentu ini hanya akan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Pada titik inilah politik pengendalian makna oleh pihak dominan berlangsung.

Relevan seperti apa yang menurut Stuart Hall makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi pada praktik pemaknaan. Bagi Stuart

Hall pers pada dasarnya tidak memproduksi melainkan menentukan (*to define*) realitas melalui pemakaian kata-kata yang terpilih. Makna tidaklah secara sederhana dapat dianggap sebagai reproduksi bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial (*sosial struggle*) perjuangan dalam memenangkan makna. Hal ini bisa dilihat jelas dari intervensi proses pengolahan informasi oleh pihak-pihak tertentu. Melalui berita-berita yang disajikan akan ada suatu pemaknaan dan makna yang dipahami dan disepakati secara normatif oleh masyarakat. Melalui berita-berita yang disajikan akan ada suatu makna yang dipahami dan disepakati secara normatif oleh publik.

Masih mengutip dari Stuart Hall, realitas tidaklah secara sederhana dapat dilihat sebagai suatu set fakta, tetapi hasil dari ideologi atau pandangan tertentu. Definisi dari realitas ini diproduksi secara terus menerus melalui praktik bahasa (yang dalam hal ini) selalu berusaha sebagai pendefinisian secara selektif dari realitas yang hendak ditampilkan. Implikasinya adalah semua persoalan atau peristiwa nyata tidak akan menunjukkan makna integral, tunggal dan intrinstik dan makna yang muncul adalah makna yang ditransformasikan melalui bahasa. Hal ini terjadi karena begitu banyak pemaknaan yang disajikan, serta publik bebas memaknai setiap berita sesuai dengan latar belakang, kepentingan dan keahlian yang dimilikinya. Makna dan konteks ini adalah sebuah produksi sosial, hasil dari sebuah praktik. Realitas yang dihadirkan pers adalah realitas yang telah "terdistorsi".

Realitas itu telah di serang dan di suarkan oleh kelompok yang dominan yang ada dalam masyarakat dan merupakan pertarungan antara berbagai kelompok untuk menonjolkan basis masing-masing. Sehingga realitas yang hadir pada dasarnya bukan realitas yang alamiah, tetapi sudah melalui proses pemaknaan kelompok yang dominan. Pada posisi ini masyarakat sudah tidak bebas lagi memilih konsekuensi dari makna yang dipilihnya.

Selain itu, dalam hal penerimaan makna, umumnya makna pertama seringkali lebih berbekas ketimbang informasi yang berikutnya. Sehingga terlepas apakah ia langsung percaya atau tidak percaya, yang jelas secara informasi telah berdampak kepada seseorang "*the damage has been done*" (Edmon Makarim, 2006). Ada suatu "ruang kerugian" disini yang tidak cukup terjawab hanya dengan hak jawab dan hak koreksi. Sepatutnya, semakin intelektual seseorang jelas akan semakin tinggi pula amanat yang harus diembannya untuk memperhitungkan segala sesuatu yang dapat terjadi dari karya intelektualnya tersebut. Sayang hal ini tidak sebanding lurus dengan publik sebagai konsumen makna dengan tingkat pendidikan yang heterogen. Oleh karena itu, pertanggung jawaban bagi para jurnalis berdasarkan keilmuannya sepatutnya tahu sejauhmana efek dari kata-katanya, jelas juga harus diimbangi dengan beban sanksi yang relatif lebih berat ketimbang orang awam. Jika hal ini tidak ada, maka jelaslah bahwa segelintir orang akan senang mempelintir kata-kata dan mungkin pula akan berakibat timbulnya mafia makna dalam tubuh pers.

Lalu bagaimana kaitannya dengan istilah pers yang bebas atau kebebasan pers? Sesuai dengan sejarahnya pers yang lahir dari aktivitas jurnalistik kepentingan hukumnya adalah menginginkan kebebasan dalam memperoleh data serta mengolahnya menjadi informasi yang akan dipublikasikan. Selanjutnya bagaimana dengan asumsi bahwa perspun memandang bahwa institusinya berdedikasi tinggi apabila sukses dalam meningkatkan oplah, menguasai komersial slot tanpa khawatir bahwa yang dipublikasikan dapat berdampak buruk pada masyarakat. Tinjauan kebebasan pers pada kurun waktu (termasuk era pemerintahan) tertentu, minimal harus beranjak dari dua pertanyaan. Kedua pertanyaan itu akan memotivasi semangat dan tekad membangun kebebasan pers, sebagai kebebasan manusia yang dilandasi ranah pertanggungjawaban kemanusiaan. Bukan sebagai bentuk penjabaran kebebasan tanpa rambu, tanpa batas, serta bersifat *to be or not to be* (ada atau tidak, harus ada, bisa atau tidak, harus bisa). Pertanyaan mendasar pertama adalah untuk apa sesungguhnya kebebasan pers? Apakah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana landasan idealisme dan profesionalitas media massa yang bersifat universal? Ataukah, kebebasan pers ditafsirkan sebagai prasyarat mutlak cara berpikir dan cara bergerak aktualisasi kebebasan (manusia).

Benar memang pers itu bebas, termasuk untuk berpihak. Contohnya, sebuah pers dapat mendukung semua pihak tertentu atau mungkin menentang pihak lainnya. Atau bisa saja bersikap mendua terhadap suatu pihak, kadang bersikap pro dan kadang bersikap kontra. Pers bisa menentukan diri sebagai lawan, atau sebagai 'pengawal'. Pers bahkan mampu mengkritisi dan menentukan bagaimana suatu kebijakan menjadi kesalahan, dapat bertindak pula sebagai "anjing penjaga" atau "senjata" untuk mendukung atau sebaliknya menyerang pihak tertentu. Realitas sosial atau politik bisa menjadi bahan perbincangan, perdebatan dan interpretasi oleh figur-figur pers.

Jika kita menafsirkan kebebasan pers dalam alur berpikir pertama, kebebasan pers memang pantas, dan seharusnya diperjuangkan serta ditegakkan semua pihak. Baik oleh pengelola pers, maupun oleh publik media (termasuk rakyat dan pemerintah). Tetapi, sebaliknya, kalau penafsiran kebebasan pers terjebak kepentingan yang terkandung dalam pertanyaan kedua, justru bisa menimbulkan aneka kendala buat pengelola dan publiknya. Ini disebabkan kebebasan pers seakan kebal (resisten) atas segala bentuk intervensi, baik hukum maupun moral publik

Pertanyaan mendasar yang kedua, yaitu kebebasan siapa, harus dijawab dengan benar. Sebab, aktualisasi kebebasan pers menghadirkan pertanyaan, kebebasan pers itu kebebasan dari (kepentingan) siapa? Apakah kebebasan pers adalah kebebasan insan pers atau pengelola media massa semata? Atau juga kebebasan publik media dalam memanfaatkan jasa pers, khususnya

guna memuasi kepentingan sendiri (kepentingan konsumen informasi publik), terlepas dari kepentingan produsen informasi (kepentingan pengelola media massa)? Karenanya, tidak mengherankan bila kebebasan pers saat ini lebih tampak sebagai wujud kebebasan (bebasnya) pemerintah, dibanding bebasnya pengelola media dan konsumen pers, untuk menentukan corak dan arah isi yang dimaksud

Kondisi mengkhawatirkan seperti ini seringkali terjadi dan ternyata bukan saja merugikan tetapi menimbulkan ancaman serius; masyarakat sebagai penikmat makna akan mempercayai realitas tanpa perlu mempertanyakan dan memperdebatkannya terlebih dahulu, bahkan pada akhirnya makna yang menyebar dianggap sebagai sesuatu yang normatif. Posisi seperti mengharuskan pers menyajikan informasi kepada publik seobyektif mungkin meskipun secara naturalianya ia tetap bersifat subyektif karena sebenarnya terlahir dari ekspresi ide dari seseorang. Perspektifnya terhadap sesuatu peristiwa tentu akan tetap melekat dalam penyajian informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, suatu berita tidak dapat dikatakan obyektif dari awalnya sehingga dengan sendirinya ia tidak bebas nilai atau tidak bebas dari kepentingan subyektif orang yang menuliskannya. Disinilah netralitas media menjadi sangat relevan untuk menjadi suatu persyaratan hukum (*requirement of neutrality*). Untuk itu diperlukan suatu standar obyektifitas untuk menentukan apakah ia layak dikatakan sebagai suatu karya jurnalistik. Perlindungan hukum yang diberikan kepada si pencari dan penyampai informasi hanyalah ditujukan bagi setiap pihak yang memang menghargai dan tunduk dengan etika jurnalistik, bukan kepada pihak-pihak yang "sembarangan" dalam menguntai kata-kata.

Penutup

Dipandang dari sisi bisnis, karena informasi adalah suatu komoditi yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat informasi, maka bisnis untuk menjadi penyedia informasi adalah peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Hal ini tentunya menjadi suatu ancaman tersendiri bagi pengharagaan akan nilai-nilai "kemerdekaan pers" terutama nilai-nilai netralitas dan obyektifitas itu sendiri dalam memproduksi makna. Sejauhmana kepentingan pemodal tidak akan mengendalikan kepentingan pers itu sendiri.

Adalah suatu hal yang sangat lumrah dalam hukum investasi, bahwa konsekwensi dari adanya suatu investasi adalah adanya kendali dalam perusahaan itu termasuk kendali akan makna yang harus disajikan. Dari sisi pemodal tentunya akan menjadi sangat begitu indah jika informasi yang disampaikan mengandung makna yang sesuai dengan kepentingannya dan dapat menaikkan tiras atau oplahnya di masyarakat..

Ditinjau lebih luas lagi sesuai dengan perspektif ilmu perundang-undangan, mungkin penyebab kenapa kondisi Pers sekarang ini seperti ini adalah juga didasari sejauhmana keefektifan aturan main yang ditetapkan

dalam UU Pers. Jika memang mekanismenya adalah sebeb-bebasnya maka insan pers jadi bertindak sebeb-bebasnya. Dan sedikit janggal rasanya bahwa pemerintah dihilangkan sama sekali dalam proses penerapannya sementara lembaga pelaksana Dewan Pers juga tidak mempunyai kekuatan yang dapat memaksa pihak pers untuk bertindak meluruskan makna yang berkembang sebagaimana mestinya. Ia hanya merupakan wadah untuk penetapan Kode Etik, alternatif penyelesaian sengketa, serta pengkajian hukum dan kebijakan saja. Sementara pada sisi yang lain, peranan masyarakat juga belum dapat dikatakan cerdas menyikapi segala sesuatu dan mampu berpartisipasi aktif sebagaimana yang diharapkan.

Semua orang tentunya akan sepakat bahwa pers adalah backbone dari penyelenggaraan negara yang baik. Sesuai dengan perpesktif *fourth estate* yang meletakkan Pers setara dengan Pemerintah, maka logikanya jika memang ada hukum untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, sepatutnya juga ada standar dalam menyelenggarakan sistem media yang baik. Sehingga akan sangat adil bagi semua pihak, dan refleksi yang dihasilkan oleh pers adalah bagaimana informasi yang dibuat adalah benar sehingga tidak melahirkan makna yang keliru dan menyesatkan. Jika kita semua memang ingin ada "*trust*" oleh masyarakat kepada pelaku pers, jangan biarkan mekanisme itu terjadi tanpa prosedur yang kuat. Security untuk mendapatkan trust memang harus dibangun dengan cara *best effort*, dengan kata lain harus ada standar untuk good information governance dalam media, hal itulah yang akan dapat membatasi tanggung jawab bagi segenap insan media. Semuanya ini dikembalikan kepada kesadaran dan semangat kita semua untuk menyelamatkan karakteristik bangsa ini di masa depan. Harapannya Pers dapat lebih mencitrakan diri dalam harkat dan martabatnya sebagai *honorable profession* ditengah masyarakat.

Akhirnya, diharapkan bahwa UU sebagai pedoman sikap tindak Pers dan Masyarakatnya dapat melindungi kepentingan pada idealis media masa yang berupaya sekuat mungkin untuk menyajikan informasi yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memaknai dengan benar dari setiap informais yang disajikan. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan pers kedepan mengandung makna yang tidak mementingkan kelompok kapitalis dominan. Ada ruang dimana masyarakat juga diberikan hak untuk memberikan makna sesuai dengan kehendak dan pemahamannya, dan yang lebih penting adalah bagaimana informasi itu diterjemahkan dengan makna yang benar. Jika memang benar-benar kita ingin menyelamatkan para idealis pers, maka tidak ada kata lain kita harus mau membuka diri untuk mencerna kembali disetiap makna yang hadir dengan kedalaman pemahaman sehingga tidak ada lagi infrmasi kiluru dan merugikan banyak pihak. []

Daftar Rujukan

- Alex Sobur. 2004. *Analisis teks media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotic dan Analisis Framing*. Bandung: Rosdakarya.
- Denis Mcquail. 1994. *Teori Komunikasi Massa suatu pengantar*. Surabaya: Erlangga.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana, pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKIS.
- Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya.
- Jalaluddin Rakhmat. 1996. *Komunikasi dan Perubahan Politik Indonesia, dalam latif, Y dan Ibrahim I.S. Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orba*. Bandung: Mizan.
- Sunarto. 2001. *Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-Anak*. Semarang: Kerjasama penerbit Mimbar dan Yayasan Adikarya Ikapi serta Ford Foudation.

www.duniesai.com

Biodata Penulis

Neka Fitriyah, S.Sos lahir di Jakarta, 11 Agustus 1977. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Ilmu Komunikasi dari Universitas Samratulangi (Unsrat), Manado. Selain menjadi pengajar tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Untirta, ia juga menjadi penyiar di stasiun radio swasta Harmony FM. Bisa di hubungi via e-mail: neka_fizria@plasa.com atau di nomor: 08164613911.